

Pembentukan Kecamatan Pesanggrahan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana di Kota Jakarta Selatan

The Establishment of a Disaster-Resilient in Pesanggrahan Sub District on South Jakarta

Fathin Aulia Rahman^{1*}, Abdul Haris Achadi¹

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: fathin.auliarahman@budiluhur.ac.id

Abstract

Potential disasters in South Jakarta include floods, landslides, fires, disease epidemics and social conflicts. There are 25 flood location points in South Jakarta and it is the Administrative City with the highest number of flood location points in DKI Jakarta. Pesanggrahan sub-district is one of the sub-districts passed by the Pesanggrahan watershed which is part of a series of watersheds that originate at Mount Salak and flow through several areas. The concept of resilience is important for every region or region to have. Resilience or toughness is a system of ability to anticipate, avoid, or resist, adapt and spring back due to disturbances or crises due to disasters. So that it is necessary to establish disaster resilient institutions in the sub-district area or at the sub-district level in order to increase community resilience to facing disasters. Therefore, we as the academic community of Budi Luhur University carry out assistance in the formation of a disaster-resilient sub-district in Pesanggrahan District, which is expected to form a community of people engaged in disaster management.

Keywords: Resilient, Mapping, Participatory

Abstrak

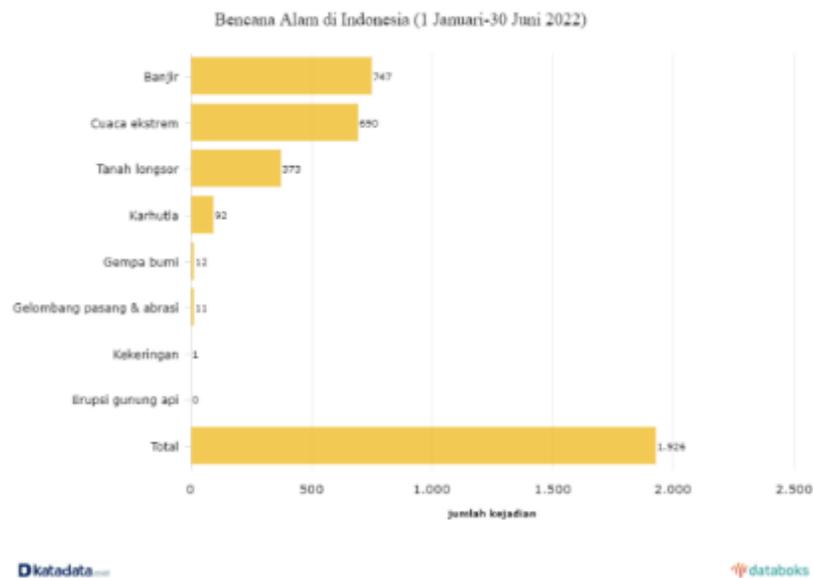
Potensi bencana yang ada di Kota Jakarta Selatan meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, epidemi penyakit dan konflik sosial. Terdapat 25 titik lokasi banjir di Jakarta Selatan serta menjadi Kota Administrasi dengan jumlah titik lokasi banjir terbanyak di DKI Jakarta. Kecamatan Pesanggrahan merupakan salah satu kecamatan yang dilalui oleh DAS (Daerah Aliran Sungai) Pesanggrahan yang merupakan bagian dari rangkaian Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Gunung Salak dan mengalir melewati beberapa wilayah. Konsep ketahanan penting untuk dimiliki oleh setiap wilayah atau daerah. Ketahanan atau ketangguhan merupakan sistem kemampuan untuk mengantisipasi, menghindari, atau menolak, beradaptasi dan melenting kembali akibat adanya gangguan atau krisis akibat bencana. Sehingga diperlukan pembentukan lembaga tangguh bencana di wilayah kecamatan atau pada tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi bencana. Sebagai sivitas akademik Universitas Budi Luhur melaksanakan pendampingan pembentukan kecamatan tangguh bencana di Kecamatan Pesanggrahan, yang diharapkan dapat terbentuk komunitas masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan bencana.

Kata kunci: Tangguh, Pemetaan, Partisipatif

Pendahuluan

Paradigma penanggulangan bencana telah mengalami banyak perubahan. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada masa tanggap darurat, akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Menurut (Indonesia, 2007) tentang Penanggulangan Bencana, lingkup risiko bencana mencakup potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas, meliputi; penetapan kebijakan pembangunan berwawasan risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca-bencana (Alfiah dkk., 2021). Intensitas kejadian bencana di Indonesia kian meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Menurut BNPB hingga Juni 2022 terdapat 1.926 kejadian bencana di seluruh Indonesia dengan kejadian bencana terbanyak yaitu banjir sebesar 747 kejadian.



Gambar 1. Data Kejadian Bencana Alam Bulan Januari - Juni 2022
Sumber: BNPB dalam databoks.katadata.co.id

Menurut jakita.jakarta.go.id, Potensi bencana Kota Jakarta Selatan meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, epidemi penyakit dan konflik sosial. Terdapat 25 titik lokasi banjir di Jakarta Selatan dan menjadi Kota Administrasi dengan jumlah titik lokasi banjir terbanyak di DKI Jakarta. Daerah dengan tingkat bahaya (*hazard*) tinggi dengan kerentanan dan kerawanan (*vulnerability*) yang juga tinggi maka akan secara langsung memberikan dampak yang luas apabila individu, kelompok maupun lembaga di wilayah tersebut tidak memiliki ketahanan terhadap bencana (*disaster resilience*). Konsep ketahanan penting untuk dimiliki oleh setiap wilayah atau daerah (Rahman dkk., 2022). Bentuk ketahanan wilayah yaitu ketahanan masyarakat dan ketahanan lembaga. Menurut (Ma'arif, 2011) ketahanan (*resilience*) atau juga disebut ketangguhan merupakan suatu sistem kemampuan untuk mengantisipasi, menghindari atau menolak, beradaptasi dan melenting kembali akibat adanya gangguan atau krisis akibat bencana.

Secara administratif Kecamatan Pesanggrahan berada di Kota Jakarta Selatan. Kecamatan Pesanggrahan terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu; Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Ulujami, Petukangan Selatan dan Petukangan Utara yang total wilayahnya seluas 13,45 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 223.306 jiwa yang terdiri dari laki-laki 112.019 jiwa dan perempuan 111.287 jiwa. Secara geografis Kecamatan Pesanggrahan memiliki ketinggian rata-rata sebesar 26,2 mdpl. Kelurahan Bintaro menjadi wilayah tertinggi yaitu berada di 46 mdpl

dan Kelurahan Petukangan Utara menjadi kelurahan dengan wilayah terendah berada di 19 mdpl.

Kecamatan Pesanggrahan merupakan salah satu kecamatan yang dilalui oleh DAS (Daerah Aliran Sungai) Pesanggrahan yang merupakan bagian dari rangkaian Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Gunung Salak yang mengalir melewati beberapa wilayah seperti Depok, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan dan Cengkareng sebagai hilirnya. Kecamatan Pesanggrahan termasuk kedalam klasifikasi iklim tipe B. Menurut data curah hujan selama 10 tahun, diketahui terdapat 83 bulan basah dan 21 bulan kering sehingga tergolong daerah basah. Berdasarkan informasi diatas hal tersebut mengindikasikan bahwa Kecamatan Pesanggrahan merupakan wilayah rawan bencana banjir. (Ariyani, 2016) membagi tingkat kerawanan banjir Kecamatan Pesanggrahan menjadi tiga tingkatan, yaitu; agak rawan banjir, rawan banjir, dan sangat rawan banjir. Kategori daerah rawan banjir seluas 12,1 Km² atau sebesar 90,01% dari wilayah Kecamatan Pesanggrahan.

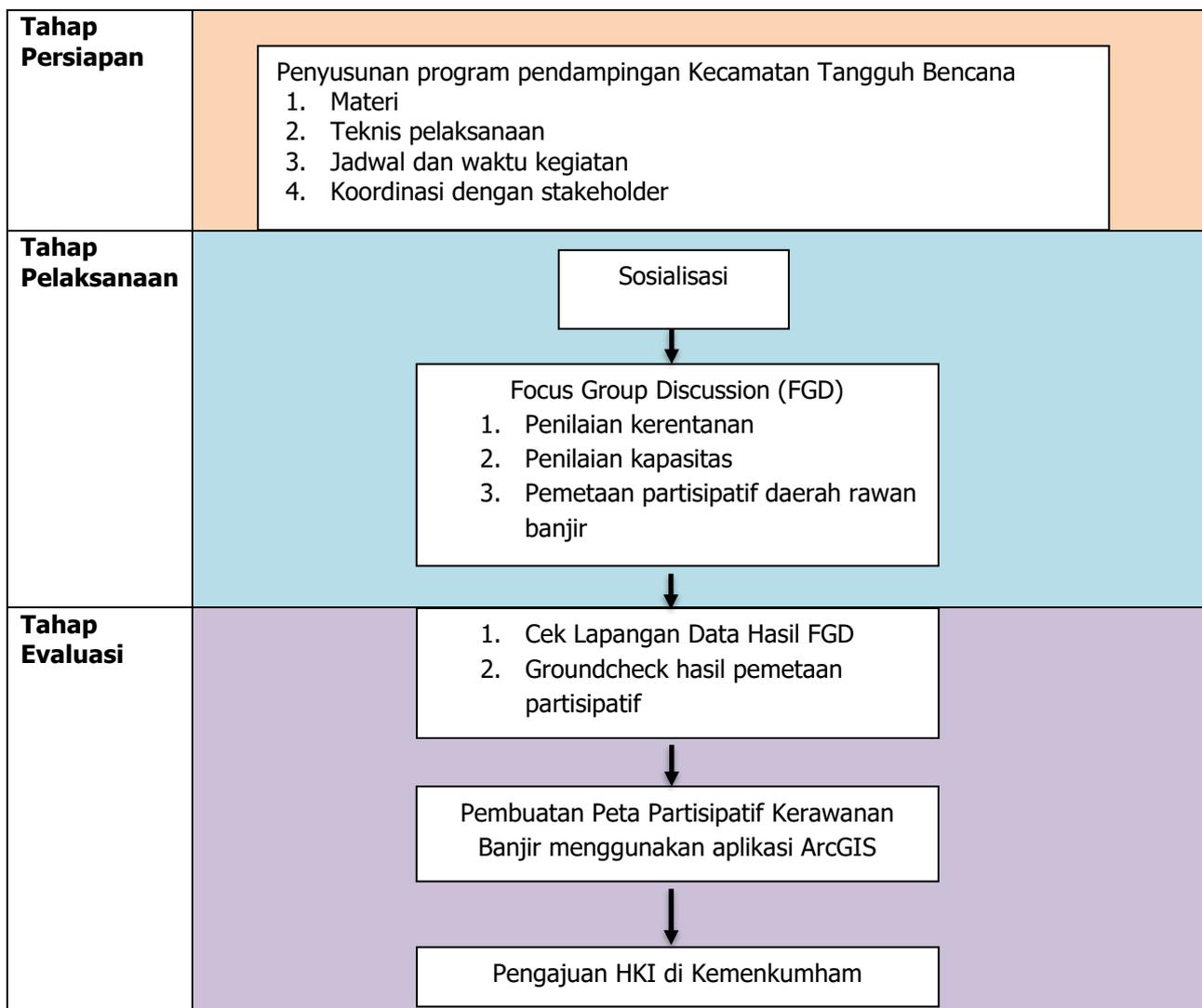
Selain bencana banjir, Kecamatan Pesanggrahan juga memiliki risiko bencana kebakaran yang cukup besar. Menurut BPS Kota Jakarta Selatan Tahun 2018 ancaman bencana kebakaran gedung dan pemukiman menduduki posisi pertama. Penyebab kebakaran didominasi oleh gangguan listrik yaitu adanya korsleting listrik yang jumlahnya mencapai 938 kejadian. Wilayah di Kecamatan Pesanggrahan yang paling sering terjadi kebakaran meliputi; di Kelurahan Petukangan Utara (RW 01, 02 03) dan Petukangan Selatan (RW 02). Jumlah korban yang terdampak bencana kebakaran di Kecamatan Pesanggrahan mencapai 1.600 jiwa. Sehingga wilayah Petukangan Utara menjadi daerah dengan risiko multibencana.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya lembaga atau komunitas masyarakat yang secara khusus bergerak dibidang kebencanaan. Hal ini tentu mengindikasikan tingkat ketahanan masyarakat dan lembaga yang rendah, terlebih besarnya angka kelompok rentan di Kecamatan Pesanggrahan yaitu sebanyak 68.187 jiwa. Pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi, kapasitas masyarakat dan kelembagaan yang belum baik, atau dapat dikatakan wilayah tersebut memiliki ketahanan masyarakat yang rendah, maka diperlukan suatu lembaga atau komunitas yang berfokus pada penanggulangan bencana. Fungsi lembaga atau komunitas ini adalah untuk menolong korban dari kejadian bencana dan berupaya meminimalisir dampak bencana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Fungsi lain yang lebih luas dari lembaga kebencanaan di tingkat kecamatan atau kelurahan adalah untuk mempersiapkan rencana kontijensi penanggulangan bencana, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder dan swasta (sektor industri) serta mendukung program pemerintah dalam pengurangan risiko bencana. Sehingga diperlukan pembentukan lembaga tangguh bencana di wilayah kecamatan atau pada tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi bencana.

Pemerintah dan masyarakat di wilayah Kecamatan Pesanggrahan memiliki sejumlah permasalahan lingkungan, salah satunya adalah terjadinya banjir yang disebabkan oleh luapan sungai maupun limpasan akibat tingginya debit hujan terutama di puncak musim penghujan antara bulan November hingga Januari. Permasalahan bencana banjir di Kecamatan Pesanggrahan khususnya di Kelurahan Petukangan Utara memerlukan penanganan yang komprehensif dan tuntas, berikut beberapa permasalahan kompleks yang telah dirumuskan, yang meliputi; a) Lembaga Kebencanaan, lembaga yang bergerak dibidang kebencanaan belum ditemukan di lingkungan Kecamatan Pesanggrahan, baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun bentuk swadaya masyarakat secara sukarela. Sehingga penanggulangan bencana saat ini masih dilakukan secara spontan dengan tanpa perencanaan dan

pengkoordinasian yang baik. Hal ini tentu berhubungan dengan tidak adanya dokumen kebencanaan berupa data kapasitas masyarakat, lembaga maupun ekonomi masyarakat, b) Pemetaan Bencana di Kecamatan Pesanggrahan, selain tidak ditemukannya lembaga kebencanaan di masyarakat, wilayah Kecamatan Pesanggrahan juga belum memiliki peta kerawanan bencana banjir. Padahal pemetaan wilayah kerawanan banjir dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh para stake holder di lingkungan kelurahan maupun kecamatan, c) Program Pelatihan dan Simulasi Mengenai Pengurangan Risiko Bencana, kegiatan pelatihan dan simulasi yang dilaksanakan secara rutin juga tidak dapat ditemukan dokumennya. Padahal kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan kapasitas masyarakat yang nantinya dapat mencegah risiko bencana bagi masyarakat baik dari kehilangan dan rusaknya harta benda maupun korban jiwa.

Metode Pelaksanaan



Fasilitas pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan melibatkan elemen pentahelix dalam pengurangan risiko bencana meliputi OPD dan perangkat Kecamatan Pesanggrahan (regulator), relawan dan perwakilan warga di

kelurahan (akselerator), media masa (pengganda), pelaku usaha (pendorong), serta akademisi (konsep & inovasi). Selain itu dibutuhkan perwakilan warga dari setiap kelurahan, RW atau RT yang memiliki permasalahan bencana banjir pada wilayah tempat tinggalnya. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, Tahap Persiapan, dilakukan meliputi penyusunan program pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana yang meliputi menyusun materi, teknis pelaksanaan, jadwal dan waktu pelaksanaan serta melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Kedua, Tahap Pelaksanaan, dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai program Kelurahan Tangguh Bencana serta dilanjutkan dengan FGD untuk penilaian kerentanan dan kapasitas wilayah dan diakhiri dengan pemetaan partisipatif. Ketiga, Tahap Evaluasi, dilaksanakan cek lapangan hasil penyusunan dokumen kerentanan dan kapasitas serta melakukan konfirmasi terhadap wilayah yang dipetakan. Kemudian hasil survei lapangan dan dokumen yang ada digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Peta Partisipatif Kerawanan Banjir yang diolah menggunakan aplikasi ArcGIS. Pada tahap akhir peta hasil pengolahan ArcGIS dalam bentuk pdf berukuran A0 diajukan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) melalui website Kemenkumham.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Budi Luhur dilaksanakan di Kecamatan Pesanggrahan dengan *pilot project* Kelurahan Petukangan Utara telah berjalan dengan lancar. Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan dan pertemuan dengan melibatkan beberapa pihak serta masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah ditingkat kecamatan dan kelurahan terhadap pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana merupakan bentuk dukungan yang nyata bagi terlaksananya kolaborasi pentahelix dalam pengurangan risiko bencana. Unsur pentahelix yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi; pemerintah, dunia usaha, media masa, akademisi dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan audiensi Dewan Kota, Pemerintah Kecamatan, serta tokoh masyarakat yang dilaksanakan pada Senin, 29 Mei 2023 di Rumah Makan Padang Sederhana Jalan Masjid Petukangan. Pada kegiatan tersebut menentukan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai *pilot project* dalam pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana. Melalui diskusi dan koordinasi antar pemangku kebijakan, ditunjuklah wilayah Petukangan Utara menjadi proyek percontohan karena dianggap memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi dan kesiapan perangkat desa dalam merespon kegiatan tersebut. Selain itu wilayah Kelurahan Petukangan Utara merupakan tempat dimana Universitas Budi Luhur berada, sehingga pada kategori Ring 1 Kampus Budi Luhur yang diharapkan masyarakat merasakan dampak positif dari keberadaan Universitas Budi Luhur.



Gambar 2. Diskusi dan Audiensi Pembentukan Kecamatan Siaga Bencana

Penilaian kerentanan dan kapasitas wilayah dalam menghadapi banjir Kelurahan Petukangan Utara menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan diawali dengan pengumpulan informasi mengenai potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Kelurahan Petukangan Utara menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang meliputi aspek; ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan (Saputra & Rodiyah, 2022). Partisipan mengisi tiap aspek sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan dengan penjelasan oleh instruktur FGD dan diarahkan oleh panitia. Tiap aspek ditulis dalam kertas note untuk kemudian ditempel sesuai dengan tabel SWOT yang telah disediakan.



Gambar 3. Pemetaan Partisipatif dan Penilaian Kerentanan Kapasitas Melalui FGD

Hasil penilaian kerentanan dan kapasitas terhadap kondisi eksisting Kelurahan Petukangan Utara yang telah dituliskan oleh perwakilan masyarakat setiap RW dan perangkat desa kemudian dituliskan dalam tabel rekapitulasi analisis SWOT. Data yang terkumpul lebih lanjut dapat digunakan sebagai bahan analisis risiko dan kajian resiliensi wilayah dalam menghadapi bencana banjir di Kelurahan Petukangan Utara. Perhitungan risiko dan kajian resiliensi yang kedepannya dilakukan menggunakan indeks yang telah ditetapkan oleh BNPB maupun penelitian-penelitian yang telah ada.

Tabel 1. Rekapitulasi Analisis SWOT

Aspek	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • (RW 08) banyak warga berprofesi sebagai pedagang • Banyak toko kelontong • Banyak pengrajin tahu • Terdapat perkantoran dan perdagangan • (RW 09) banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lansia (tanpa pekerjaan) butuh bantuan ketika banjir • Banyak pegawai harian lepas • Susah / jarang mendapat bantuan dari pemerintah • (RW 09) Bantuan logistik saat banjir kurang bisa memenuhi kebutuhan dasar • Bantuan pakian untuk balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak bantuan berasal dari warga RT/RW lain, berupa; masakan / makanan, baju bekas layak pakai 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat masuk kerja • Rawan PHK atau terkena SP (Surat Peringatan)

Aspek	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	pedangan pakaian di Cipulir			
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Banyak relawan warga yang membantu saat terjadi banjir Kelompok pengajian, kegiatan PKK, TPA Kerja bakti (RW 09) Aktifnya kegiatan Karang Taruna / Pemuda Kelompok PKK 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya koordinasi dari masyarakat di lingkungan dan pemerintah kelurahan Petukangan Utara Kurangnya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah Lokasi dapur umum yang berpindah-pindah tiap terjadi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat saudara di kelurahan / RW lain untuk mengungsi Terdapat pengungsian / penitipan kendaraan saat terjadi banjir Disediakan posko pengungsian banjir oleh kelurahan Posko pengungsian dari swadaya masyarakat sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga PPSU yang terbatas setelah banjir
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat posko bencana Pintu air (pengendali debit air) Memiliki; 2 perahu karet 8 dayung Ring Buoy 8 unit Pelampung 8 unit Aktifnya grup whatsapps warga jika terjadi banjir RW (09) pompa pengendali banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya EWS TOA / pengeras suara untuk antisipasi Akses internet dan jaringan yang sulit saat bencana banjir 		<ul style="list-style-type: none"> Banyak alat elektronik yang rusak pasca banjir

Aspek	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	<ul style="list-style-type: none"> Pintu air 2 unit 			
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Sungai sudah dan rutin dikeruk dan diperdalam 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimen lumpur pada selokan / got yang tebal membuat aliran air mampet Mebutuhkan pengerukan sungai Turap kali yang belum layak Saluran air yang perlu dibenahi Sulitnya jalur dan tempat evakuasi (perahu karet sulit masuk) Wilayah yang rendah dan diapit 2 saluran air / kali Minim tempat pengungsian RW (08) RT 1 merupakan daerah yang rendah (cekungan) yang selalu banjir Perlu penutup got / saluran air agar kendaraan tidak terperosok Pemukiman yang padat Kurangnya fasilitas penanganan bencana di RW 09 Banyak rumah tinggal yang dibangun diatas saluran air Jumlah SDM kelurahan minim dalam penanganan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Penitipan barang dan kendaraan ke wilayah Kompleks BNI Kelurahan Ulujami 	<ul style="list-style-type: none"> Muncul penyakit DBD, cikungunya, ispa, diare, penyakit kulit, pasca banjir Banjir volume besar di RW 09 dan 08 Kesulitan mendapat air bersih selama dan pasca banjir Banyak sampah Muncul hewan seperti ular, biawak dsb Lumpur yang susah dibersihkan Merusakan rumah dan struktur rumah Tidak ada MCK sementara saat dan pasca banjir

Pemetaan partisipatif daerah rawan banjir dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) secara partisipatif oleh masyarakat (Hamid dkk, 2022). Adapun perwakilan elemen masyarakat yang hadir meliputi kelompok ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Ketua RW 08, 09, 11, 07, 03, Damkar, Kelurahan, Lurah Petukangan Utara, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat serta perwakilan masyarakat di lingkungan sekitar Kantor Kelurahan Petukangan Utara. Masing-masing perwakilan RW dan pemerintah kelurahan menunjukkan dan memberikan warna dengan pensil warna wilayah mana saja yang menjadi daerah rawan banjir. Partisipan membuat garis area yang sering terkena banjir, membedakan warna sesuai dengan riwayat kedalaman banjir, serta menuliskan tempat yang biasa digunakan oleh warga untuk mengungsi.

Tabel 2. Luas Kelas Kerawanan Banjir

No	Kelas Kerawanan	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	284,39
2	Rendah	9,32
3	Sedang	0,42
4	Tinggi	4,87
Total Luas		299

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), Kelurahan Petukangan Utara memiliki luas wilayah sebesar 2,99 km² atau 299 hektar yang terdiri atas 11 RW dan 121 RT. Luas wilayah dengan kerawanan banjir dibagi menjadi empat kelas kerawanan, yaitu; sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kelas kerawanan banjir berdasarkan kisaran dari riwayat ketinggian rata-rata banjir yang terjadi di wilayah Kelurahan Petukangan Utara. Pada kelas kerawanan sangat rendah dengan kedalaman banjir atau genangan berkisar antara 0 – 15 cm dengan total luas area 284,39 Ha, kelas kerawanan rendah kedalaman antara 16 – 35 cm dengan luas area 9,32 Ha, kelas kerawanan sedang kedalaman antara 36 – 70 cm dengan luas area 0,42 Ha, dan kelas kerawanan tinggi kedalaman antara 71 – 125 cm dengan luas area 4,87 Ha. Pada wilayah dengan kategori kelas kerawanan tinggi sebagian besar berada pada bagian utara Kelurahan Petukangan Utara yaitu RW 08 dan 09 yang merupakan wilayah sepanjang saluran Jalan Swadarma. Wilayah yang masuk kategori kerawanan tinggi tepat berada pada saluran air yang berkelok-kelok (*meandering*). Hal ini sesuai dengan yang temuan Harsoyo (2013) bahwa dataran banjir umumnya berada di sekitar aliran sungai yang berkelok-kelok (*meandering*) atau pada titik pertemuan anak sungai dengan aliran sungai utama, sehingga potensi banjir di wilayah tersebut menjadi sangat tinggi.

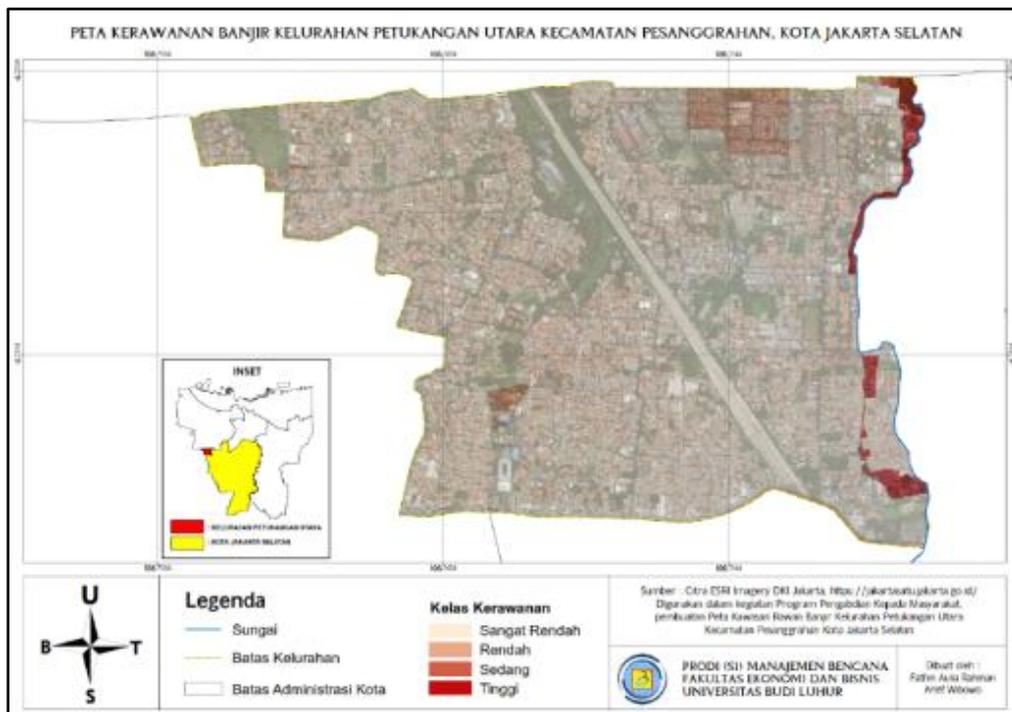
Hasil dari FGD juga diperoleh data tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat sebagai shelter pengungsian ketika terjadi banjir. Penentuan shelter pengungsian banjir ini pada awalnya dilakukan secara spontan sebagai respon cepat masyarakat yang terdampak bencana untuk mencari lokasi yang aman terhadap banjir. Kemudian dari pihak pemerintah desa menetapkan lokasi lokasi tersebut untuk menjadi shelter pengungsian dengan membatasi kapasitas daya tampung lokasi untuk para pengungsi dan dilakukan pembagian jumlah pengungsi di tiap-tiap shelter. Sehingga pihak pemerintah desa dapat dengan mudah melakukan kontrol terhadap pengawasan distribusi bantuan baik logistik maupun pemantauan kesehatan warga selama masa tanggap darurat. Sebaran lokasi shelter pengungsian yaitu.

Tabel 3. Sebaran Lokasi Shelter Pengungsian Banjir

No	RW Pengungsi	Nama Lokasi	Kapasitas (orang)
1	09	GPIB Sejahtera RT 07 RW 04	200
2	08	Rumah Bapak Maryanto RT 01 RW 08	50
3	01	Rumah Ibu Dahleni	40
4	07	Sekretariat RW 07	50
5	08	Yayasan Nurul Jannah RW 08 RT 01	50
6	09 RT 09	Mushala Al-Hasan RW 05 RT 10	20
7	09 RT 1, 2, 3, 4	Rumah Bapak Rusdi RW 04 RT 04	20
8	09 RT 07 dan RW 08	Masjid Al-Muawanah RW 08 RT 03 Kel Ulujami	200
9	09 RT 07 dan RW 08	Swadarma Komplek BNI RW 08 RT 08 Kel Ulujami	Mobil

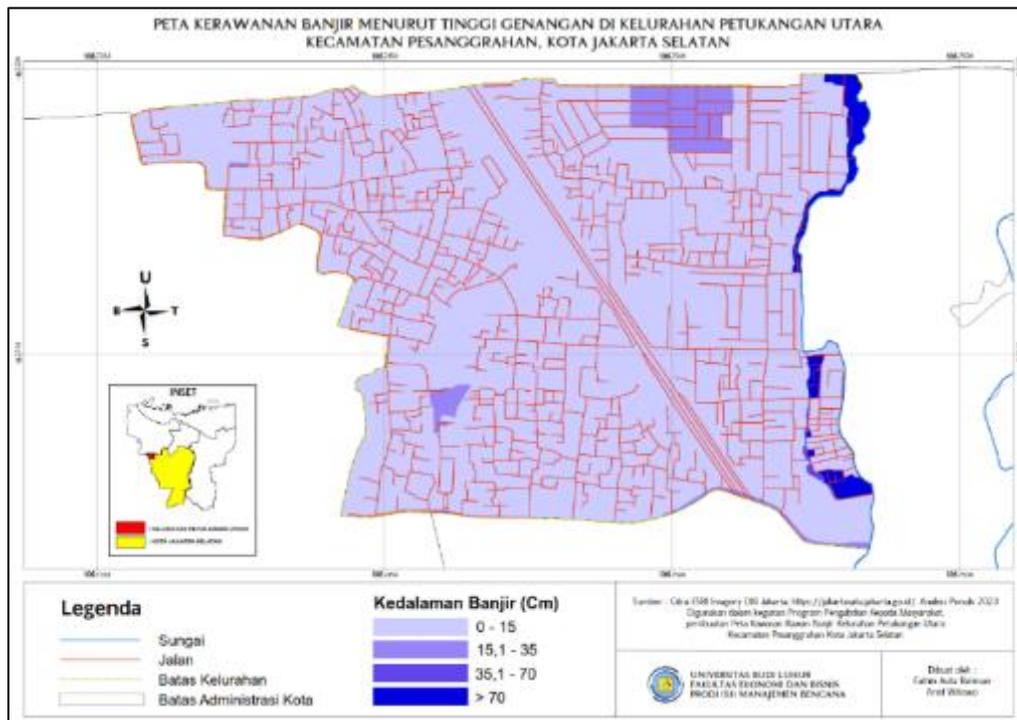
Meski terdapat banyak lokasi shelter pengungsian, namun muncul permasalahan pada shelter pengungsian bagi warga RW 09. Ketika terjadi banjir warga RW 09 harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan terdekat, yaitu ke wilayah Kelurahan Ulujami. Pemerintah Kelurahan Ulujami tidak bersedia mengeluarkan anggaran daruratnya maupun bantuan logistik dan kesehatan karena status pengungsi adalah masyarakat Kelurahan Petukangan Utara. Permasalahan lain muncul karena warga seringkali kesulitan mendapat sumber air bersih dan

keperluan MCK (Mandi Cuci Kakus) selama masa tanggap darurat bencana banjir. Bantuan yang diberikan seringkali terlambat dan tidak terdistribusi secara merata terutama bagi warga RW 08 dan RW 09 yang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir. Pentingnya dilakukan koordinasi oleh pihak pemerintah Kelurahan Petukangan Utara dengan pemerintah Kelurahan Ulujami dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara kolaborasi, komprehensif dan inklusif (Ruslanjari dkk., 2023). Karena bencana yang terjadi tidak pernah terikat dengan wilayah administrasi, sehingga upaya bersama ini harus terjalin dan memiliki pedoman yang kuat dalam pelaksanaannya (Suherningtyas dkk., 2022).



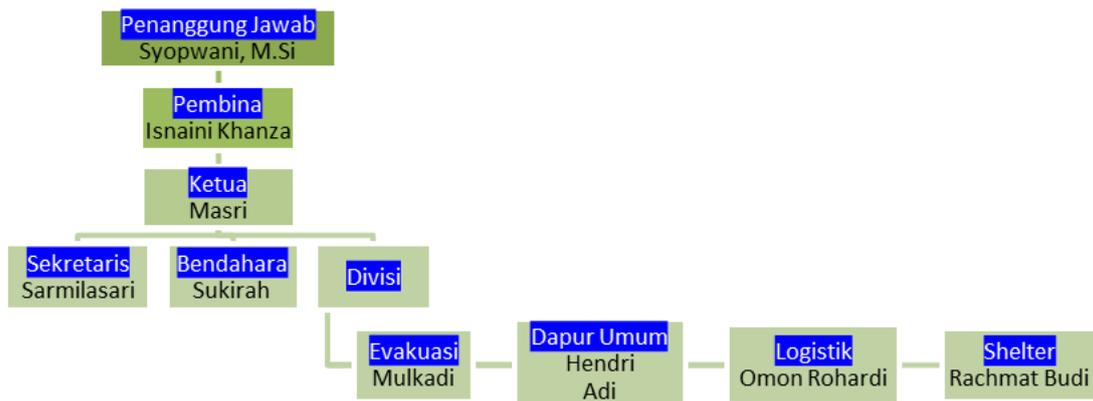
Gambar 4. Peta Partisipatif Kerawanan Banjir Kelurahan Petukangan Utara

Pada pemetaan partisipatif kerawanan banjir Kelurahan Petukangan Utara, masyarakat turut memberikan keterangan wilayah dengan kedalaman rata-rata saat terjadi banjir. Kedalaman bervariasi mulai dari banjir limpasan akibat saluran air yang mampet dan meluap setinggi 15 cm hingga pada wilayah RW 08 dan 09 yang memiliki ketinggian genangan 70 hingga 125 cm. Pada banjir limpasan biasanya hanya terjadi pada saat hujan berlangsung dan kiriman air dari daerah yang lebih tinggi dengan durasi yang relatif singkat hanya berkisar 10 - 30 menit setelah hujan berhenti. Sedangkan pada wilayah dengan tinggi genangan 15,1 – 35 cm tersebar di wilayah; sepanjang Jalan Ciledug bagian bawah toll hingga bagian timur arah Swadarma, depan Universitas Budi Luhur, Kantin hingga parkir belakang UBL, sebagian wilayah RW 11, serta sepanjang jalan Perumahan Alfa Indah. Wilayah dengan tinggi genangan 35,1 – 70 cm meliputi hampir sepanjang perbatasan RW 09 dengan RW 04. Sedangkan wilayah dengan tinggi genangan lebih dari 70 cm berada pada RW 09 yang berbatasan dengan RW 04, RW 08 yang berbatasan dengan Kelurahan Ulujami, serta yang terparah dengan ketinggian hingga 125 cm berada di RW 09 RT 01 dan 02.



Gambar 5. Peta Partisipatif Kerawanan Banjir Menurut Tinggi Genangan

Sosialisasi Kecamatan Tangguh Bencana kepada perangkat desa dan masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pemetaan partisipatif. Peserta diberikan gambaran mengenai peran Kelurahan Tangguh Bencana bagi masyarakat baik pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Materi sosialisasi yang diberikan meliputi divisi minimum yang harus ada dalam kegiatan penanggulangan bencana di wilayah kelurahan yang meliputi; divisi evakuasi, dapur umum, logistik, dan shelter. Diharapkan setelah terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana masyarakat dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan tugas dan keahlian yang dimiliki untuk lingkungan tempat tinggalnya.



Gambar 6. Struktur Kepengurusan Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Petukangan Utara

Kegiatan diskusi dan sarasehan pembentukan kepengurusan Kelurahan Tangguh Bencana yang telah dilaksanakan menghasilkan kepengurusan dan keanggotaan seperti pada Gambar 6. Pembentukan kepengurusan dilaksanakan melalui kegiatan diskusi dan sarasehan dengan pihak kelurahan dan perwakilan masyarakat baik secara daring maupun luring. Lurah Petukangan Utara Bapak Syopwani, M.Si turut memberikan saran kepengurusan tim yang nantinya akan

menjadi anggota dan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana. struktur kepengurusan yang telah terbentuk telah diarahkan untuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang nantinya mereka akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan bekerja dalam kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan Kelurahan Petukangan Utara.

Kesimpulan

Inisiasi pembentukan kecamatan tangguh bencana di Kecamatan Pesanggrahan dengan *pilot project* Kelurahan Petukangan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan metode FGD (*Focus Group Discussion*) yang menghasilkan data kerentanan dan kapasitas wilayah dalam tabel analisis SWOT, luas kerawanan banjir, lokasi shelter pengungsian, peta partisipatif kerawanan banjir, peta partisipatif tinggi genangan banjir dan struktur kepengurusan kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Petukangan Utara. Sosialisasi mengenai Kecamatan Tangguh bencana juga dilakukan kepada perangkat desa dan perwakilan masyarakat Kelurahan Petukangan Utara mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana. Harapannya kedepan pelaksanaan pendampingan Kecamatan Tangguh Bencana dapat diterapkan diberbagai kelurahan khususnya yang berada di Kecamatan Pesanggrahan. Sehingga dapat terbentuk masyarakat yang tangguh bencana dan mampu beradaptasi terhadap kondisi yang ada, serta terbentuk ketahanan wilayah yang baik.

Daftar Pustaka

- Alfiah, R., Aprilia, S. N., & Hayati, N. N. (2021). Strategi Penanganan Banjir Perkotaan Pada Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 3(2), 79–86. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/MATRAPOLIS/index>
- Ariyani, N. (2016). *Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk Analisis Pemetaan Daerah Rawan Banjir Pada Sub DAS Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah.
- BPS. (2019). *Statistik Daerah Kecamatan Pesanggrahan 2019*.
- Hamid, N., Purwaningsih, R., Juhadi, J., Aroyandin, E. N., & Suyanto, H. (2022). Disaster Education through Participatory Mapping in Abrasion Prone Areas in Sarang, Central Java. *Jurnal Kawistara*, 12(1), 115. <https://doi.org/10.22146/kawistara.70465>
- Harsoyo, B. (2013). Mengulas Penyebab Banjir Di Wilayah DKI Jakarta dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi dan Morfometri Sungai. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 14(1), 37–43.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007*.
- Ma'arif. (2011). *Startegi Menuju Masyarakat Tangguh Bencana dalam Perspektif Sosial*. Gadjah Mada University Press.

- Rahman, F. A., Ruslanjari, D., & Giyarsih, S. R. (2022). Strategi Adaptasi Masyarakat selama masa Pandemi Covid-19: Studi di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. *Jurnal Kawistara*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/kawistara.67782>
- Ruslanjari, D., Safitri, E. W., Rahman, F. A., & Ramadhan, C. (2023). ICT for public awareness culture on hydrometeorological disaster. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.103690>
- Saputra, N. B., & Rodiyah, I. (2022). Floop Disaster Management Strategy In Sidoarjo District Based On SWOT Analysis. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1281>
- Suherningtyas, I. A., Permatasari, A. L., & Febriarta, E. (2022). Pemetaan partisipatif dalam mitigasi kebencanaan banjir dan longsor di Kelurahan Pringgokusuman Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 27(1), 26–37. <https://doi.org/10.17977/um017v27i12022p26-37>

